

**MEMAHAMI KEBUDAYAAN LOKAL PAPUA :
SUATU PENDEKATAN PEMBANGUNAN YANG MANUSIAWI
DI TANAH PAPUA**

Enos H. Rumansara

*Senior Lecturer Cenderawasih University

contact:

Abstract

Tulisan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pemerintah agar dalam membangun orang Papua haruslah menggunakan pendekatan budaya dari pada menggunakan pendekatan keamanan yang tidak akan menyelesaikan masalah sosialnya. Orang Papua terdiri dari 254 suku bangsa yang mendiami 4 zona ekologis, yaitu : (1) zona rawa, pantai dan sepanjang aliran sungai; (2) zona dataran tinggi; (3) zona kaki gunung dan lembah-lembah kecil; dan (4) zona dataran rendah, pesisir dan kepulauan. Orang Papua tersebar mendiami 4 zona tersebut, sehingga untuk membangun mereka tidak bisa menyamaratakan mereka karena karakteristik budaya mereka berbeda sesuai dengan zona yang mereka diami. Dikemukakan pula beberapa kasus pembangunan yang gagal akibat dari pembangunan yang sifatnya top down sehingga bertentangan dengan karakteristik budaya mereka yang telah dibangun sejak nenek moyang mereka. Melalui tulisan ini, pendekatan budaya disarankan harus digunakan sebagai media pembangunan paling penting untuk suatu perubahan.

Kata Kunci : Pendekatan Budaya, Orang Papua

I. Pendahuluan

Pembangunan merupakan rencana kegiatan dalam rangka merubah suatu keadaan ekonomi, politik, social, budaya menuju keadaan baru yang diinginkan oleh perencana pembangunan itu. Setiap lembaga negara, pemerintahan atau organisasi selalu memiliki program pembangunan yang tujuan akhirnya selalu menginginkan tercapainya suatu keadaan yang baik. Pemerintah Indonesia dalam membangun rakyat Indonesia telah memiliki perencanaan yang sangat ketat yang pada jaman Orde Baru dikenal dengan Rencana Pemangunan Lima Tahun (REPELITA). Namun demikian beberapa program pembangunan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru di Indonesia (sebelum tahun 1998) yang ketika itu banyak mengalami kegagalan, karena menyamaratakan program-program pembangunan tanpa melihat kekhususan setiap daerah di Indonesia yang beragam kondisi alam dan etnik (suku bangsa). Papua termasuk wilayah paling timur Indonesia yang mengalami hal yang sama dimana selama pembangunan yang dilaksanakan pada masa Orde Baru banyak mengalami kegagalan walau-

pun potensi sosial dan kekayaan alam di Tanah Papua sangat mendukung program-program tersebut. Kasus-kasus pembangunan bermasalah yang ditemui dilapangan pada umumnya berhubungan dengan masalah penggunaan lahan milik adat, tanah adat yang beralih fungsi, program pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat local sasaran pembangunan, program pembangunan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya local, dan lingkungan hidup sekitar proyek yang dibangun. Sehubungan dengan itu, setiap program pembangunan di bidang manapun sangatlah perlu untuk memahami kondisi social budaya masyarakat local pemilik tanah adat, termasuk lingkungan alam serta sejumlah nilai kearifan local yang dimiliki masyarakat local. Hubungan-nya dengan itu, maka sangatlah perlu para perencana pembangunan di Tanah Papua harus memahami kondisi fisik wilayah dan karakteristik sosial budaya Orang Asli Papua.

Suku-suku bangsa yang disebut sebagai orang asli Papua yang mendiami Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) berjumlah **250 suku bangsa**. Mereka ini memiliki

karakteristik sosial budaya yang berbeda satu sama lainnya, karena dipengaruhi oleh kondisi alam (*zona ekologis*) yang terdapat di Tanah Papua. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan 250 suku bangsa tersebut tersebar di Tanah Papua dan mendiami zona-zona ekologis yang ada sehingga karakteristik budayanya dipengaruhi pula dengan zona-zona ekologis tersebut.

Sehubungan dengan itu, pembangunan fisik maupun social budaya orang asli Papua di tanah Papua seharusnya disesuaikan dengan nilai budaya, hukum adat, norma dan aturan-aturan budaya orang Papua yang tinggal pada zona-zona ekologis yang ada agar rencana-rencana pembangunan tersebut dapat didukung dengan potensi alam dan kondisi sosial – budaya masyarakat asli Papua.

Berikut ini ditampilkan zona- zona atau kawasan ekologis yang ada di tanah Papua agar memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kehidupan manusia Papua (suku-suku bangsa Papua) yang tinggal pada zona-zona tersebut. Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang pembagian zona ekologis di tanah Papua berdasarkan ketinggian maupun sistem pertanian di tanah Papua. Ahli yang dimaksud antara lain: Boelaars (1983), Petocz (1987), Laporan penelitian yang dilakukan oleh "Lavalin Internasional Incorporate "di Papua (1987) dan Tukher (1988). Untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua, kami sarankan menggunakan pembagian zona ekologis dalam Laporan Penelitian dari "Lavalin Internasional Incorporated" yang bekerja sama dengan "PT.Hasfarm Dian Konsultan" tentang Rencana Pembangunan Daerah Papua, sektor Antropologis (1987). Adapun pembagian zona ekologisnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. **Zona Rawa, Pantai dan Sepanjang Aliran sungai** : suku-suku bangsa yang mendiami zona ekologis ini adalah suku Asmat, suku Jagai, suku Marind-Anim, suku Kamoro, suku sebyar, suku Simuri, suku Irarutu, suku Waropen dan suku Bauzi.
- b. **Zona Dataran Tinggi** : suku-suku bangsa yang mendiami **zona** ekologis ini adalah suku Lani, Ngalum, suku Mee, suku Nduga, suku Amungme, suku Moni, suku

Yali dan suku Hubula.

- c. **Zona Kaki Gunung dan Lembah-Lembah Kecil** : suku-suku bangsa yang mendiami zona ini adalah suku Sentani, Nimboran, Meybrat, suku Attam dan orang Muyu,
- d. **Zona Dataran Rendah dan Pesisir** : suku-suku bangsa yang mendiami zona ini **adalah** suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Sorong sampai Nabire, Biak dan Yapen.

Kondisi alam tersebut mempengaruhi semua unsur-unsur budaya kelompok-kelompok etnis / suku bangsa yang mendiami 4 zona ini, seperti halnya sistem peralatan atau teknologi tradisional, sistem religi, organisasi sosial sistem pengetahuan, dan kesenian (arsitektur tradisional, music, tari, seni ukir dan lukis).

Hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas maka sangatlah penting apabila pembangunan daerah harus Berbasis Kearifan Lokal. Dalam membangun daerah-daerah yang masih berpegang erat dengan nilai budaya localnya sangat perlu mendisain konsep pembangunannya harus melakukan kajian mendalam untuk memahami budaya local mereka.

Bertolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka sistematikan penjelasannya dapat diurutkan sebagai berikut.

II. Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal

Hubungannya dengan apa yang diuraikan pada pendahuluan maka sangatlah penting apabila pembangunan daerah itu berbasis kearifan local. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan masyarakat yang direncanakan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang dilakukan secara sistematis, yang di dalamnya sering mengalami hambatan atau kegagalan karena selalu berten-tangan dengan *nilai budaya* (etika, aturan, resep, norma, hukum adat dan aturan khusus lainnya) yang dimiliki oleh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu.

Perlu diketahui secara umum bahwa, kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat local yang menjadi sasaran pembangunan.

Nilai-nilai budaya (etika, aturan, resep, norma, hukum adat) sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai penduduk local sehingga secara tradisional diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya ini merupakan suatu potensi sosial-budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang suatu suku bangsa sehingga sangatlah sulit untuk diganti dengan nilai baru yang sama sekali mereka tidak tahu. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai budaya inilah yang mengatur sistem sosial masyarakat, yaitu: etika, norma, aturan dan hukum adat yang mengatur tentang :

- a. hubungan/relasi manusia dengan sang penciptanya,
- b. hubungan/relasi manusia dengan sesamanya, dan
- c. hubungan/relasi manusia dengan lingkungannya.

Aturan, norma dan hukum adat yang mengatur hubungan-hubungan inilah yang dikatakan sebagai *kearifan lokal* yang telah lama mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, sesama, dan lingkungannya.

Secara tradisional setiap suku bangsa memiliki kearifan local yang berfungsi menjaga lingkungan lingkungan social dan alam dimana mereka tinggal. Sirtha, Nyoman mengemukakan bahwa Fungsi Kerifan Lokal bermacam-macam, antara lain :

- Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam;
- Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia;
- Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
- Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan;
- Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara dan penyucian roh leluhur.
- Berfungsi untuk menciptakan hubungan harmonis antar manusia, kelompok, kelompok etnik dan umat beragama.
- Dan fungsi lainnya.

Melihat kepada apa yang dikemukakan di atas, maka sangat penting apabila suatu program pembangunan harus memperhatikan nilai kearifan

local dalam penyusunan dan pengembangan suatu program. Dalam arti pembangunan yang berbasis kearifan local adalah pembangunan yang menghendaki perencanaan pembangunan harus bersifat perencanaan dari bawah.

III. Kondisi Sosial-Budaya Orang Papua

Pada bagian ini dikemukakan beberapa unsur kebudayaan yang merupakan dasar dari pola perilaku kehidupan orang Papua yang dibentuk oleh 4 zona atau kawasan wilayah ekologis yang telah dikemukakan di atas. Namun sebelumnya perlu diketahui asal nama, ciri dan identitas orang Papua.

A. Nama, Ciri, Identitas Orang Papua

1. Nama

Orang Papua yang sekarang kita kenal terdiri dari 254 suku bangsa asli yang mendiami di pulau paling timur dari kawasan Nusantara. Pulau ini telah mengalami beberapa kali penamaan berdasarkan perkembangan sejarah. Orang Belanda menyebut pulau Papua dahulu yaitu *Nieuw-Guinea* oleh seorang pelaut Spanyol, *Ynigo Ortiz de Retes* (1545) yang menyebut "*Neuva Guinea*" (*Guinea Baru*). Penduduk Irian (Papua) yang berkulit hitam mengingatkan-nya kepada penduduk pantai Guinea di benua Afrika (Naber, 1915). Sebutan lain juga adalah "*Papua*" yang mula-mula dipakai oleh pelaut Portugis *Antonio d' Arbreu* yang mengunjungi pantai Papua pada tahun 1551. Nama itu sebelumnya dipakai oleh *Antonio Pigafetta* pada waktu berada di laut Maluku pada tahun 1521. Kata "*Papua*" berasal dari kata Melayu "*Pua-pua*" yang berarti "*keriting*" (Stirling, 1943: 4, dalam Koentjaraningrat, 1993).

Dalam konferensi Malino 1964 nama "*Irian*" diusulkan oleh F. Kaisepo. Kata itu berasal dari bahasa Biak yang artinya "*Sinar matahari yang menghalau kabut di laut*", sehingga ada "*harapan bagi para nelayan Biak untuk mencapai tanah daratan Irian*". Pengertian lain dari kata ini juga pada orang Biak, bahwa Irian itu berasal dari dua kata yaitu "*Iri*" dan "*ryan*". *Iri* berarti "dia" (Dia yang dimaksud disini adalah Tanah) dan *ryan* berarti "panas". Jadi arti dari kata Irian adalah "*tanah*

yang panas". Masyarakat Marind-anim di pantai selatan mengatakan kata *Irian* berarti "*tanah air*" (Koentjaraningrat, 1993: 3-4). Ciri dan Identitas Orang Papua tidak pernah diteliti oleh para ahli mengenai ciri-ciri ras. Hanya beberapa orang dokter dan ahli antropologi ragawi saja yang telah melakukan pengukuran tinggi badan dan indeks ukuran tengkorak pada beberapa individu di beberapa tempat yang terpencar. Bahan-bahan itu belum cukup untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang ciri-ciri fisik orang Papua. Menurut *H.J.T. Bijlmer* (1923), dalam Koentjaraningrat, 1993). Ada kecenderungan bahwa orang Papua makin jauh dari pantai makin pendek tubuhnya, demikian pula bentuk tengkorak penduduk pantai umumnya lonjong dan makin kearah pedalaman bentuknya menjadi sedang. Indeks ukuran bagian-bagian muka pada beberapa penduduk pantai ada yang lebar, namun tidak jarang pula ada orang pantai yang panjang bentuk mukanya, dan didaerah pedalaman keadaannyapun sama (Bijlmer, 1956, lihat Koentjaraningrat, 1993). Seorang ahli ragawi Belanda J.P. Kleiweg de Zwaam mengatakan bahwa ras Papua atau ras Irian itu tidak ada (1956:431, lihat Koentjaraningrat, 1993), memang di antara penduduk Papua sendiri ada perbedaan ciri-ciri ras khusus. Kebinekaan ciri-ciri ras pada berbagai penduduk asli Papua lebih jelas terlihat melalui ciri-ciri ras *fenotip* mereka, yaitu warna dan bentuk rambut, walaupun dalam hal ini tidak ada keseragaman. Warna rambut orang papua hampir se-muanya hitam tetapi tidak semuanya keriting. Penduduk yang tinggal di sepanjang aliran sungai Mamberamo, rambutnya banyak yang berombak dan bahkan ada pula yang lurus (Moszkowski, 1911), sedang ada pula yang lurus dan kejur (Neuhauss, 1911: 280, dalam Koentjaraningrat, 1993).

Mengenai asal mula orang Papua, Teuku Jacob, guru besar Antropologi ragawi Universitas Gajah Mada pernah mengadakan proposisi dalam desertasinya yang berjudul "*Some Problems Pertaining to the Racial History of the Indonesian Region*" (1967). Ia menduga bahwa di zaman es yang terakhir kira-kira 800.000 tahun yang lalu ketika Papua masih menyatu dengan benua Australia, penduduk yang

merupakan nenek moyang penduduk *Papua* dan *Melanesia*, tetapi juga nenek moyang penduduk asli Australia yang memiliki ciri-ciri fisik *Paleo-Melanesoid*. Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut menjadi tinggi, maka Australia terpisah dari Papua serta pulau-pulau Nusantara. Ciri fisik penduduk Papua dan Melanesia berkembang menjadi ciri-ciri ras *Melanesoid* yang kita kenal sekarang, sedang ciri fisik penduduk Australia berkembang menjadi ciri fisik ras *Australoid*. Adapun nenek moyang kedua ras itu yaitu ras *Paleo-Melanesoid*, masih sempat bermigrasi ke kepulauan Nusantara bagian barat, dan ciri fisiknya masih tampak sisa-sisanya pada tengkorak manusia purba *Homo Wajakensis* yang ditemukan di Wajak, di Jawa Timur, yang menurut para ahli *paleo-antropologi* hidup berkeliaran di Jawa Timur kurang lebih 400.000 tahun yang lalu (Koentjaraningrat, 1993)

Orang Papua yang asli tadi agaknya juga mendapat pengaruh ciri-ciri fisik para pendatang dari Asia Timur di zaman purba, atau dari orang-orang Asia yang tiba dalam zaman yang lebih muda. Campuran antara ciri fisik *Paleo-Melanesoid* yang asli dengan ciri fisik yang berasal dari para penda-tang di zaman lebih muda ditempat-tempat yang berbeda itulah, ditam-bah dengan penyesuaian ekologi diberbagai daerah yang secara geografi terpisah (seperti orang Tapiro di pegunungan Jayawijaya) yang agaknya mengakibatkan ke-binekaan ragawi orang Papua yang ada sekarang ini (Lihat Koentjaraningrat dan Amir Sutarga, 1993, "Kebinekaan Ras Penduduk Irian Jaya" dalam *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* ed. Koentjaraningrat, dkk., Jakarta, Djambatan hal. 110-116)

B. Keaneka Ragaman Sosio Budaya Orang Papua

Penduduk orang asli Papua di provinsi Papua dan Papua Barat tergolong sangat sedikit jumlahnya, namun dari segi kesukubangsaan dan budaya memperlihatkan suatu ke-bine-kaan yang amat besar. Kebinekaan suku bangsa tercermin dalam berbagai unsur budaya seperti bahasa, struktur organisasi sosial, sistem kepemim-

pinan, agama, dan sistem mata pencaharian hidup berdasarkan ekologi daerah tersebut. Masyarakat yang bersifat *plural societies* yang multi etnik, multi kultural, multi kedaerahan, dan multi keagamaan itu membawa implikasi beragam dan spesifiknya institusi menyebabkan hubungan dan jaringan sosial kelompok-kelompok masyarakat lebih banyak bersifat *homophily* dibanding *heterophily*. Penduduknya diklasifikasi sesuai spesifikasi geografis, ekologi, kewilayahan, sosial, budaya, dan ekonomi.

1. Bahasa

Orang Papua secara umum dibagi kedalam dua kelompok besar menurut pembagian bahasa yang digunakan. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa *Austronesia* dan bahasa *Non Austronesia*. Ada-pun bahasa-bahasa yang masuk dalam kelompok *Austronesia* disebut dengan nama *bahasa-bahasa Papua*. Dua bahasa ini merupakan bahasa induk yang kedalamnya tergolong bahasa-bahasa lokal yang kurang lebih 250 buah bahasa (Silzer, 1986; Penelitian Program Bahasa, Uncen, 2001).

2. Peralatan Hidup/Teknologi

Pada masyarakat tradisional sedikitnya ada 8 (delapan) macam sistem *peralatan* dan unsur kebudayaan fisik yang digunakan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil yang berpindah-pindah, atau masyarakat petani di pedesaan. Ke-8 (delapan) sistem peralatan itu adalah: (1) alat-alat produksi, (2) Senjata, (3) Wadah, (4) Alat untuk membuat perahu, (5) Makanan, Minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu; (6) Pakaian dan perhiasan, (6) Tempat berlindung dan rumah, dan (7) alat-alat transportasi.

Peralatan hidup yang digunakan dalam kebudayaan orang Papua sangat bervariasi sesuai dengan kondisi alam (zona ekologis) tanah Papua. Selain itu, peralatan hidup yang bervariasi juga merupakan hasil dari proses akulturasi (kontak budaya) yang terjadi di tanah Papua. Misalnya, etnis yang tinggal di daerah pantai penggunaan peralatan jauh lebih lengkap *dibandingkan* dengan etnis yang ada di daerah pedalaman. Peralatan hidup yang dimiliki orang

Papua umumnya berfungsi sebagai alat produksi (mengolah sumber daya alam), sebagai wadah (tempat makan, menyimpan, dan mengolah), sebagai senjata (berburu dan berperang.), sebagai pakaian dan perhiasan, dan sebagai status sosial.

Contoh kasus pada orang **Dani/ Lani** yang menggunakan "*Kapak Batu*" untuk memotong, "*Busur dan Panah*" (senjata) untuk berperang, Tugal untuk mebuat بدن dan menanam petatatas (*Hipere*), "*Koteka*" untuk pakaian laki-laki dan "*Sali*" untuk pakaian perempuan.

Rumah, umumnya orang Papua memiliki rumah sebagai tempat untuk berlindung, berkumpul, pemujaan, pendidikan dan status sosial. Rumah yang dibangun selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam dan cara-cara (arsitektur) yang berbeda berdasarkan etnis masing-masing. Rumah dibangun diatas tiang kayu dengan berbagai macam ukuran yang setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing (dapur, tempat tidur, tempat berkumpul, dan sebagainya). Misalnya, rumah di dataran tinggi (pedalaman Papua) berbeda dengan rumah-rumah yang berada di daerah rawah, aliran sungai, pesisir pantei dan kepulauan. Misalnya, rumah adat dari beberapa suku, antara lain: Rumah *Adat Korwari* dari Jayapura, Rumah *Adat Rumsaram* dari Biak, Rumah *Adat Jewu* dari Asmat, Rumah *Adat Karapau* dari orang Kamoro, dan rumah *Honai* dari suku Lani.

3. Struktur Sosial

Bila berbicara tentang "*struktur sosial*" atau "*organisasi sosial*" suatu masyarakat ini berarti kita bicara suatu sistem sosial dan budaya yang terdiri dari berbagai kelompok suku yang memandang hubungan sosial berdasarkan posisi dan peranan yang saling berkaitan. Bila kita katakan bahwa struktur sosial dari suatu masyarakat mengandung sistem-sistem ikatan sosial, kita mempunyai resiko menghadapi kekacauan konsepsi. Untuk memudahkan pemahaman struktur sosial, kita harus mulai dengan hubungan sosial, yaitu cara mereka berinteraksi, hal-hal yang mereka katakan dan lakukan dalam hubungan mereka satu sama lain. Tetapi terdapat juga gagasan mereka tentang

hubungan mereka, konsepsi masing-masing tentang pihak yang lain, pemahaman dan strategi serta pengharapan yang menuntun perilaku mereka. Baik pola perilaku maupun sistem konseptual mempunyai struktur, dalam arti tidak kacau balau atau sembarangan, tetapi kedua hal tersebut merupakan struktur yang berbeda jenis (Keesing, 1989:208-209).

Berbicara tentang struktur sosial berarti mengacu pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang menata kehidupan bermasyarakat suatu kesatuan hidup sosial yang bersumber pada hubungan kekerabatan dan diwujudkan dalam sistem istilah kekerabatan maupun pewarisan keturunan. Pemahaman terhadap istilah kekerabatan penting karena itu mensyaratkan hak dan kewajiban yang harus diperankan dalam kesatuan hidup sosialnya.

Orang Papua dibedakan berdasarkan *prinsip pewarisan*. Ada dua prinsip pewarisan keturunan yaitu:

- a. Melalui garis keturunan *ayah* atau *patrilineal*, dan terdapat pada suku bangsa *Meibrat, Mee, Dani, Biak, Waropen, Wandamen, Sentani, Marind-anim dan Nimboran*.
- b. Melalui *prinsip bilateral* yaitu melalui garis keturunan ayah dan ibu, terdapat pada orang dipedalaman Sarmi.
- c. Masyarakat berdasarkan *struktur ambilateral* atau *ambilineal*, dimana kadang-kadang diatur menurut garis keturunan pihak ibu atau ayah. Terdapat pada orang Yagai, Manikion, Kamoro (Pouwer, 1966).

Orang Papua juga mengenal pembagian masyarakat kedalam *moiety* yang terbagi atas dua paroh masyarakat. Terdapat pada orang Asmat (*aipmu-aipem*), Dani (*Waita-Waya*), Waropen (*burivorai-buriferai*) dalam (Mansoben, 1974, 1995; Held, 1947; Kamma, 1972; Schoorl, 1957; Heider, 1979-1980).

Sistem Perkawinan yang dianut oleh sebagian besar orang Papua adalah *eksogami moiety dan eksogami klen*. Artinya, seseorang apabila mencari jodohnya harus mencari keluar *moiety* atau kawin keluar *klen / marga*. Harta mas kawin yang digunakan adalah *kapak batu,*

manik-manik, paseda, gelang batu dan perak, piring porseling, babi dan kain timor.

Harta maskawin akhir-akhir ini mengalami pergeseran dimana sekarang *uang tunai* merupakan tuntutan pertama yang harus diselesaikan oleh keluarga pihak calon suami.

Orang Papua pada umumnya mengenal 3 bentuk perkawinan yaitu: (a) *sistem* pemberian mas kawin, (b) sistem tukar saudara perempuan, dan sistem pencurahan tenaga.

4. Sistem Politik

Orang Papua mempunyai sistem politik dalam mengatur kehidupan masing-masing suku bangsa yang multi etnik di Tanah Papua. Orang Papua mengenal sistem yang mengatur hubungan atau relasi antar warga dalam berbagai aktivitas hidupnya sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing. Orang Papua mengenal sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional, menurut Sahlins (1963) dan Mansoben (1995) terdapat empat sistem atau tipe politik di Papua yaitu:

- a. **Big man** atau *pria wibawa*: diperoleh melalui pencapaian. Sumber kekuasaan terletak pada kemampuan individual, kekayaan material, kepandaian berdiplomasi/pidato, keberanian memimpin perang, fisik tubuh yang besar, sifat bermurah hati (Sahlins, 1963; Koentjaraningrat, 1970; Mansoben, 1995). Pelaksanaan kekuasaan biasanya dijalankan oleh satu orang. Adapun etnik yang menganut sistem ini adalah orang Dani, Asmat, Mee, Meibrat, Muyu. (Mansoben, 1995)
- b. **Sistem Politik Kerajaan**: sistem ini adalah pewarisan berdasarkan senioritas kelahiran dan klen. Weber (1972:126) mengatakan sebagai birokrasi patrimonial atau birokrasi tradisional. Birokrasi tradisional terdapat pada cara merekrut orang untuk duduk dalam birokrasi. Biasanya mereka yang direkrut mempunyai hubungan tertentu dengan penguasa, misalnya hubungan keluarga atau hubungan pertemanan. Di sini terdapat pembagian kewenangan tugas yang jelas, pusat orientasi adalah perdagangan. Tipe ini terdapat di Raja Ampat,

- Semenanjung Onin, Teluk MacCluer (teluk Beraur) dan Kaimana. (Mansoben, 1995: 48).
- c. **Sistem Politik Ondoafi:** sistem ini merupakan pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional. Wilayah/teritorial kekuasaan seseorang pemimpin hanya terbatas pada satu kampung dan kesatuan sosialnya terdiri dari golongan atau sub golongan etnik saja dan pusat orientasi adalah religi. Terdapat di bagian timur Papua; Nimboran, Teluk Humboldt, Tabla, Yaona, Skou, Arso, Waris (Mansoben, 1995: 201-220).
 - d. **Sistem Kepemimpinan Campuran.** Menurut Mansoben (1985) terdapat juga sistem lain yang menampakkan ciri pencapaian dan pewarisan yang disebut sistem campuran. Sedangkan menurut *Sahlins*, sistem kepemimpinan yang berciri pewarisan (*chief*) dibedakan atas dua tipe yaitu sistem kerajaan dan sistem ondoafi. Perbedaan pokok kedua sistem politik tersebut terletak pada unsur luas jangkauan kekuasaan dan orientasi politiknya. Sistem Kepemimpinan Campuran, kedudukan pemimpin diperoleh melalui pewarisan dan pencapaian atau berdasarkan kemampuan individualnya (prestasi dan keturunan). Tipe ini terdapat pada penduduk teluk Cenderawasih, Biak, Wandamen, Waropen, Yawa, dan Maya (Mansoben, 1995: 263-307).

5. Hak Ulayat Tanah

Tanah bagi orang Papua mempunyai makna tersendiri secara luas bagi setiap kelompok etnik berdasarkan kebudayaannya masing-masing. Orang Papua memandang tanah sebagai “*mama*” atau “*ibu*” yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik dan membesarkan mereka sampai sekarang. Tanah sesungguhnya adalah *rahim* dan *buah kandungan* yang membentuk dan menciptakan manusia. Sebagaimana **Tom Beanal** (orang Amungme) mempertegas pemahamannya bahwa suku Amungme tidak pernah merasa diri terpisah dari alam sekitarnya. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam sekitarnya, karena itu jika manusia

merusak alam berarti ia merusak dirinya sendiri. Dalam bahasa Amungkal disebut “*Te Aro Neweak Lako*” yang berarti “*alam adalah aku*”. Demikian pula suku bangsa Kamoro yang menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan tanah. Orang Kamoro menyebut tanah sebagai sumber lahirnya manusia “*keluar*” yang diartikan lahir dari mata air yang disebut “*Bunyomane*.” Ini berarti bahwa setiap suku bangsa mempunyai pandangan dan persepsi sesuai dengan kebudayaan mereka masing-masing, sebagaimana orang Papua dengan kemajemukannya.

Sifat kemajemukan orang Papua dapat dilihat juga pada prinsip *hak ulayat tanah*. Diantara orang Papua terdapat kolektifa-kolektifa *etnik* yang mengatur sistem hak ulayat tanah melalui kelompok suku atau klen / marga, jadi pemilikannya secara *komunal*. Hal ini nampak jelas pada beberapa suku bangsa Papua seperti suku bangsa Dani/Lani, Biak, Awyu, Yawa, Waropen dan beberapa suku bangsa Papua lainnya. Di samping itu terdapat pula kolektifa-kolektifa yang mengatur hak ulayat melalui keluarga inti atau hak individual sebagaimana terdapat pada orang Mee (Pouwer, 1970; Mansoben, 1995).

Dasar pemilikan tanah adat itu berdasarkan beberapa faktor, antara lain: (a) faktor sejarah kampung/ wilayah adat (bisa berdasar karkante mite), pemilik tanah adat adalah suku atau klen/marga yang pertama kali datang dan menduduki tempat atau kampung, (b) Lokasi bekebum, yaitu wilayah bekas kebun dari leluhur, (c) Faktor tempat cari makan, yaitu wilayah atau tempat mereka berburu, mencari ikan, mencari buah merah dan tempat meramu sagu, (d) sebagainya.

6. Sistem Mata Pencarian

Sistem mata pencarian penduduk di Papua dipengaruhi oleh 4 (empat) zona ekologis yang telah dikemukakan di atas. Orang-orang Papua yang hidup dan terikat pada zona ekologis yang berbeda-beda ini mewujudkan pola-pola kehidupan yang bervariasi sesuai dengan zona tersebut.

Kelompok suku bangsa yang mendiami zona ekologis rawa, pantai dan sepanjang aliran sungai meliputi suku bangsa Asmat, Jagai, Awyu, Yagai Citak, Marind-Anim, Kamoro dan Waropen. Mata pencaharian utama mereka adalah menokok sagu dan menangkap ikan.

Kelompok suku bangsa yang mendiami zona ekologis dataran tinggi; meliputi: suku Lani, Yali, Ngalun, Amungme, Nduga, Damal, Moni dan orang Ekari/mee. Mata pencaharian utama mereka adalah berkebun menanam umbi-umbian dan memelihara Babi.

Kelompok suku bangsa yang mendiami zona ekologis kaki gunung dan lembah-lembah kecil; meliputi: daerah Sentani, Nimboran, Arso, Waris, Foya, Attam, Meyach, Sough. Ayamaru dan orang Muyu. Mata pencaharian utama mereka adalah berkebun, berburu dan beternak babi.

Kelompok suku bangsa yang mendiami zona ekologis dataran rendah dan pesisir; meliputi: Sorong sampai Nabire, Biak dan Yapen. Mata pencaharian utama mereka adalah berkebun, menangkap ikan dan menanam tanaman keras.

7. Sistem Religi

Sebelum agama-agama besar seperti: Kristen Protestan dan Katoli, Islam masuk di Papua, tiap suku bangsa mempunyai sistem kepercayaan tradisi. Pada awalnya masing-masing suku bangsa mempunyai kepercayaan tradisional yang percaya akan adanya kekuatan roh halus, roh leluhur atau dewa (penguasa alam semesta) yang berkuasa di atas kekuatan lainnya. Misalnya pada orang Biak Numfor, dewa tertingginya "*Manseren Nanggi*"; orang Moi menyebut "*Fun Nah*"; orang Seget menyebut "*Naninggi*"; orang Wandamen menyebut "*Syen Allah*". Orang Marind-anim menyebut "*Dema*"; orang Asmat menyebut "*Mbiwiripitsy*" dan orang Mee menyebutnya "*Ugatame*".

Semua dewa atau tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pencipta yang mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib kehidupan manusia, makhluk yang tidak nampak, juga dalam unsur alam tertentu (angin, hujan, petir, pohon besar, sungai, pusaran air, dasar laut, tanjung tertentu). Kekuatan alam itu dibujuk untuk melindungi manusia dengan

pemberian sesaji dan upacara tertentu. Sistem kepercayaan tradisi ini sudah tidak dilaksanakan secara intensif lagi sejak orang Papua memeluk agama Islam atau agama Kristen, namun dalam menghadapi persoalan-persoalan dasar yang menimpa kehidupan manusia seperti tertimpa kecelakaan, sakit dan mati, masih banyak orang Papua mencari jawabannya melalui kepercayaan tradisi mereka masing-masing. Kepercayaan demikian dalam antropologi disebut *Animisme*.

Semua kepercayaan tersebut di atas didasarkan pada mitologi yang memiliki masing-masing suku bangsa di tanah Papua. Mitologi ini pula yang menjadi dasar dari *gerakan kargoisme (curgo culd)* di tanah Papua.

8. Kesenian

Kesenian terdiri dari beberapa sub, yaitu antara lain: seni rupa (seni lukis, seni pahat, seni bangunan (artistektur), seni suara/seni musik, seni tari, seni sastra dan dramatik. Semuanya ini selalu menonjolkan sifat dan ciri khas kebudayaan suatu etnik /suku bangsa atau suatu negara.

Kesenian tradisional atau asli Papua pernah diteliti oleh orang-orang asing dengan pembagian wilayah kesenian sesuai dengan hasil penemuan mereka. Dalam "*Papua Kunst in Het Rijks Museum*" kesenian Papua dapat dibedakan menjadi 6 (enam) ragam seni yang terdiri dari: (1) Ragam seni Teluk Yos Sudarso (Humboldt baay) dan pantai utara Jaya pura, (2) Ragam seni daerah Sentani dan Tanah Merah, (3) Teluk Cenderawasih sampai pantai Selatan Sorong, (4) Ragam seni daerah Marind-Anim didaerah Merauke, (5) Ragam Seni di daerah Asmat, dan (6) Ragam Seni di daerah Mimika dan sekitarnya (Subardi, dkk., 1980 : 8-9).

Pembagian tersebut di atas, terlihat bahwa pedalaman Papua tidak disebutkan masuk ke dalam kelompok mana. Untuk itu, dapat kita tambahkan bahwa daerah pegunungan Tengah memiliki ragam seni tersendiri.

Keaneka ragam bentuk seni, khususnya tari tradisional Papua juga mengalami pergeseran fungsi dan nilai budaya yang merupakan akibat kontak dengan kebudayaan dari luar Papua. Seperti halnya Tari Pancar, tari Lemon Nipis

(Jayapura), tari Mapia, tari Balengan dan tari Dero di Meruke.

Kesenian di Papua pada dasarnya tidak bisa di pisahkan dari sistem Religi mereka karena dalam penyelenggaraannya upacara agama tradisional disitu pula ditampilkan seni sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upacara tersebut.

Apa yang telah dijelaskan di atas memberikan gambaran bahwa untuk orang Papua haruslah memahami budaya terutama nilai budaya atau kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap etnik yang menyebar pada 4 zona ekologis di tanah Papua. Ada beberapa program pembangunan yang mengalami kegagalan karena penyusunan programnya bersit dari atas (*top down*) jadi mengabaikan kearifan lokal.

IV. Kasus Pembangunan Yang Mengabaikan Kearifan Lokal di Tanah Papua

Pembangunan yang berbasis Kerifan lokal adalah sistem pembangunan yang dalam perencanaannya selalu memperhatikan dan menghargai nilai-nilai budaya dan hak-hak ulayat masyarakat lokal sebagai bagian dari suatu perencanaan. Sebaliknya, pembangunan yang tidak berbasis kearifan lokal adalah pembangunan yang dalam perencanaannya tidak memperhatikan dan menghargai nilai-nilai budaya local. Dalam kenyataannya pembangunan yang tidak berbasis pada kearifan lokal selalu mengalami hambatan bahkan kegagalan dalam hal pencapaian program pembangunan (fisik dan non fisik) dan pemanfaatannya. Dari beberapa kajian yang dilakukan ditemukan bahwa sebagian besar pembangunan yang mengalami kegagalan adalah pembangunan yang bersifat *top down* (Langsung dari pusat) sehingga tidak mengenal kondisi daerah terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan-hubungan yang dikemukakan di atas.

Ada beberapa contoh kasus pembangunan pada zaman Orde Baru di tanah Papua yang mengalami kegagalan karena tidak memperhatikan dan menghargai nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungan, yaitu :

A. Kasus Pembangunan Rumah Sehat di Lembah Balim (Tahun 1980-an)

Pembangunan Rumah Sehat yang merupakan program dari yang dikenal dengan istilah *Bandes* (bantuan desa) dan Bansos (bantuan sosial). Program pembangunan rumah sehat ini adalah program nasional sehingga model rumah dan pola pemukimannya didisain langsung dari pemerintah pusat dibangun di di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Wamena Lembah Baliem-Papua. Rumah-rumah sehat tersebut setelah dibangun masyarakat local tidak menggunakannya karena tidak sesuai dengan pola pemukiman tradisional serta nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan-hubungan sosial yang mereka miliki secara turun temurun.

B. Transmigrasi local di Koya (1980-an)

Kasus translok (transmigrasi local) yaitu pemindahan penduduk masyarakat local disatukan dengan masyarakat luar (orang Jawa, Nusa Tenggara Timur). Tujuan utama pemerintah adalah agar terjadi pengalihan tehnologi bertani kepada masyarakat local. Kasus di lokasi pemukiman transmigran di Koya-Jayapura yang menyatukan transmigran local dengan transmigran dari luar. Masyarakat local yang dipindahkan adalah keluarga dari orang Tobati yang latar belakangnya penangkap ikan di laut (Nelayan) yang dipaksakan untuk bertani. Kelompok tanslok akhirnya satuan kemudian kembali ke kampung aslinya dan melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan.

C. Ternak Domba Bantuan Presiden di Lembah Balliem (1980-an)

Bantuan ternak domba yang diberikan oleh Presiden kepada orang Lani di Lembah Balliem pedalaman Papua. Daerah ini sangat dingin dan ternak lokalnya adalah Babi. Dalam budaya mereka jumlah ternak babi yang dimilikinya dapat menentukan status sosialnya karena ternak babi adalah hartanya. Selain itu, babi mempunyai nilai religious karena berhubungan dengan mitologi asal usul orang Lani dan setiap upacara adat harus potong babi. Kemudian pemerintah masuk bantuan ternak domba untuk menggantikan posisi

babi dalam kehidupan budaya mereka tetapi pada akhirnya ternak domba gagal.

D. Kasus pemanfaatan tanah di Papua (Palang Kantor/ Rumah Sakit)

Banyak sekali terjadi konflik tanah di Papua, nilai-nilai sakral yang mengatur tanah adat mengalami pergeseran. Nilai ekonomi sangat kuat karena digiurkan dengan mahalnya tanah membuat etika, norma, aturan dan hukum adat yang mengatur tentang pemanfaatan tanah sudah tidak dihiraukan sehingga ketika pemilikan tanah secara komunal (pemilikan adat) berpindah kepada pemilikan individual/ pribadi aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan tidak berlaku dan lingkungan mejadi rusak. Contoh kasus, areal pohon bakau di Hamadi dan areal hutan sagu yang menghubungkan Abepura dan Kotaraja habis dibabat. Masyarakat local tidak memiliki lahan untuk melakukan aktivitas mencari makannya.

Selain itu, masih banyak kasus yang pembangunan di Papua yang mengalami kegagalan karena mengabaikan kearifan Lokal dalam perencanaan pembangunan. Khusus di Papua hampir sebagian besar program pembangunannya tidak pernah dilibatkan masyarakat local dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan sehingga kondisi ini tetap berlangsung hingga era-Revormasi. Kesempatan pemerintah pusat mengeluarkan Undang Undang Nomor: 21 Tahun 2001 tentang daerah Otonomi Khusus (Otsus) memberikan kesempatan untuk masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan, misalnya program RESPEK (Rencana Strategi Pembangunan Ekonomi Kampung) namun hingga saat ini hanya terlihat pembangunan fisiknya, sedangkan manusianya boleh dikatakan belum menyentuh mereka.

Menurut pemahaman saya, karena belum memahami kondisi social budaya masyarakat local yang sangat berbeda antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lain. Sehubungan dengan itu, maka melalui tulisan ini dihimbau agar membangun masyarakat yang masih kuat sistem social dan budayanya sangatlah penting memahami nilai-nilai budaya lokalnya yang dikenal dengan *Kearifan Lokal*.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Uraian yang dikemukakan di atas disimpulkan bahwa :

1. Orang Papua terdiri dari 254 suku bangsa mereka tersebar mendiami 4 (empat) zona ekologis dengan memiliki karakteristik sosial budaya yang berbeda antara satu suku dengan suku lainnya. Hal demikian dapat terlihat dari perbedaan yang ada pada unsur-unsur budaya setiap suku bangsa, yaitu mulalai dari bahasa, sistem mata pencharian hidup, sistem religi, oraganisasi sosial, kesenian dan peralatan tradisional yang mereka miliki.
2. Banyak kegagalan pembangunan terjadi disebabkan selama masa Orde Baru program pembangunan yang dilakukan bersifat *Top Down* sehingga mengabaikan kearifal local perencanaan pembangunan yang diselaksanakn di Indonesia, khususnya di Papua.
3. Pembangunan pada era Reformasi pun mengalami hal yang sama dimana perencanaan dilakukan di daerah, namun para perencana belum memahami betul nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh setiap etnik, dan selalu menyamaratakan pembangunan dengan menggunakan tolak ukur satu etnik sedangkan 254 etnik lainnya diabaikan.

B. Rekomendasi

Merujuk pada uraian tentang kondisi karakteristik sosial budaya orang Papua yang telah dikemukakan maka berikut ini dikemukakan rekomendasi dalam membangun orang Papua sebagai berikut.

1. Untuk membangun orang Papua disemua bidang, jangan menyamaratakan programnya akan tetapi menyesuaikan program dengan karakteristik sosial budaya masyarakat dengan memperhatikan 4 zona ekologis yang ada di tanah Papua, sehingga program-program pembangunan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan itu.
2. Pendekatan pembangunan bidang keamanan di tanah Papua perlu diganti dengan meng-

gunakan pendekatan yang tidak menimbulkan perasaan orang Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetapi menggunakan pendekatan yang menimbulkan perasaan orang Papua bahwa mereka adalah bagian dari NKRI, yaitu melalui *pendekatan budaya*. Pendekatan Kebudayaan yang dimaksud, yaitu pendekatan yang mengutamakan kebudayaan sebagai media atau alat pembangunan. Melalui pendekatan ini di kemukakan bahwa kebudayaan asli dapat dan harus digunakan sebagai media yang memungkinkan pembangunan dapat berlangsung dengan sukses, karena :

- Unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tradisional di mata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan di tanah Papua.
- Unsur-unsur budaya secara simbolik merupakan bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat.
- Unsur-unsur budaya mempunyai aneka ragam fungsi yang sering dijadikan sebagai sarana yang paling berguna untuk suatu perubahan.

References

Abdilah, Ubed S. 2002. *Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Penerbit Yayasan Indonesiatera.

Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. *Mengapa Papua Bergolak ?* Yogyakarta, Penerbit : Gama Global Media.

Boelaars, J. 1983. *Filsafat Manusia Orang Irian* (dalam Majalah PRISMA No.12. November-Desember).

Boelaars, J. 1983 *Manusia Irian : Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta, PT.Gramedia.

Erari, Phil K. 1999. *Tanah Kita, Hidup Kita : Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Eriksen, Thomas H. 1998. *Ethnicity & National : Anthropological Perspectives*. London. Pluto Press.

Kamma, F.C. 1970. *A Spontaneous "Capitalis" Revolution in the Western Vogelkop Area of West Irian Anniversary Contribution to Anthropology: Twelve Essays*. Leiden,132-142.

Kamma, F.C. . 1972 *Koreri : Messianic Movement In The Biak-Numfor- Culture Area*. The Hague-Mathinus Nijhoff.

Kamma, F.C. 1981, 1982, 1984. *Ajaib Di Mata Kita : Masalah Komunikasi Timur dan Barat dilihat dari Sudut Pengalaman Selama seabad Pekabaran Injil di Irian Jaya* (Jilid I, II, III). Penerjemah : Koesalah Soebagyo Toer dengan bantuan dr. Th. van den End. Jakarta : Penerbit BPK Gunung Munung Mulia.

Kasiepo, M. dkk. 1979. *Pembangunan Masyarakat Pedalaman Irian Jaya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Keesing, .M.R. 1989/1992. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer* (Jilid I-II). Jakarta : Erlangga.

Koentjaraningrat. 1963. *Penduduk Irian Barat*, Djakarta: Balai Pustaka.

Koentjaraningrat. 1970. *Keseragaman dan Aneka Warna Manusia Irian Barat*, Jakarta:LKKN-LIPI.

Koentjaraningrat . 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Cetakan ke dua. Jakarta, Penerbit Dian Rakyat.

Koentjaraningrat . 1994. *Reaksi Penduduk Asli terhadap Pembangunan dan Perubahan dalam "IRIAN JAYA MEMBANGUN MASYARAKAT MAJEMUK"*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Mansoben, Johz. R. 1980. "Gerakan Koreri di Daerah Biak, Antara 1938 – 1943". Dalam Majalah PRISMA, No. 8 Agustus 1980. LP3S.

Mansoben, Johz. R. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta. LIPI Jakarta.

Ngadisah. 2001. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Raja.

Rumansara, Enos. 2009. *Koreri dalam Gerakan Perlawanan Papua Merdeka* (Disertasi). Universitas Indonesia Jakarta.

Rutherford, Danilyn (2005). "Nationalism and Millenarianism in West Papua : Institutional Power, Interpretative Practice, and the Pursuit of Christian Truth", dalam June Nash (edit), *Social Movements : an Anthropologi Reader*. Blackwell Publishing.

Sterlan, G, John dan Godschalk. 1984. *Kargoisme di Melanesia : Suatu Studi tentang Sejarah dan Teologi Kutus Kargo*. Pusat Studi Irian Jaya, Jayapura.

Sugiono, Bambang, dkk. 1999. "Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik di Papua" dalam *Aceh, Jakarta dan Papua* (Seri I: Resolusi Konflik). Jakarta : Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA)

Tambunan, Edwin M. B. 2002. *Nasionalisme Etnis : Kashmir dan Quebee*. Semarang. Penerbit : Intra Pustaka Utama.

